

PERAN AKTOR DAN RELASI KUASA DALAM FORMULASI KEBIJAKAN JAKARTA *SMART CITY*

ANNISA SURYAMADANI

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini membahas dinamika politik dalam formulasi kebijakan dan program pengembangan Jakarta *Smart City* (JSC) dengan menggunakan teori kebijakan publik, teori *policy network*, dan teori institusional. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan institusi perlu melibatkan berbagai *stakeholder* untuk menentukan kepentingan kolektif. Keterlibatan berbagai aktor dalam formulasi kebijakan JSC terdiri dari Pemprov DKI Jakarta, TGUPP, Prof. Eko Prasajo, Kemendagri, Biro Hukum, Biro ORB, BPKD, BAPPEDA, inspektorat, DPRD, DISKOMINFOTIK, swasta, akademisi, LSM, dan media massa yang dimana Pemprov DKI Jakarta sebagai lembaga pemerintahan daerah memiliki peran sentral sebagai fasilitator, koordinator, *entrepreneur*, dan stimulator berdasarkan kewenangan dan kemampuan mengelola, melaksanakan program-program untuk pengembangan JSC yang diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah, dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Selain itu, dalam pengembangan JSC ditemukan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat satu arah karena masyarakat hanya bisa melapor melalui kanal pengaduan dan mengusulkan aspirasi di *e-musrenbang*. Implikasinya belum bisa mengintervensi dalam menentukan arah kebijakan. Selain itu, pengembangan JSC dan kerja sama yang dilakukan saat ini masih seputar pengembangan aplikasi, CCTV, dan *control room*.

Kata kunci: Aktor, relasi kuasa, jaringan kebijakan, institusional, kota pintar

***THE ROLE OF ACTORS AND POWER RELATIONS IN JAKARTA SMART CITY
POLICY FORMULATION***

ANNISA SURYAMADANI

ABSTRACT

This study aims to discuss the political dynamics in the formulation of policies and programs for the development of Jakarta Smart City (JSC) using public policy theory, policy network theory, and institutional theory. The method used is descriptive qualitative. The final result of this study shows that institutions would need to involve various stakeholders to determine common interests. The involvement of various actors in the formulation of the JSC policy consists of the DKI Jakarta Provincial Government, TGUPP, Prof. Eko Prasajo, Ministry of Home Affairs, Legal Bureau, ORB Bureau, BPKD, BAPPEDA, inspectorate, DPRD, DISKOMINFOTIK, private sector, academics, NGOs, and mass media where the Provincial Government of DKI Jakarta as a local government institution has a central role as a facilitator, coordinator, entrepreneur, and stimulator based on its authority and capability to manage and implement the JSC development program which is actualized in the form of a local government work plan that is outlined in the form of regional income, expenditure and financing. In addition, in the development of the JSC, it was found that community participation is still in a one-way form because the public is only able to report through the complaint channel and convey their aspirations in the e-musrenbang. Its implication has not been able to intervene in determining policy directions. In addition, the development of JSC and ongoing cooperation are still in the scope of the development of applications, CCTV, and control rooms.

Keywords: *Actors, power relations, policy networks, institutional, smart city*